



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No.4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 374456 - Faksimilie : (0711) 350077 Kode Pos 30137
Surel : balitbang@sumselprov.go.id, Laman : www.litbangda.sumselprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

No. 000.1.2.3/00015/BRIDA.I.I/2026

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan .

MENUGASKAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Aries Surawijaya, ST.,MM	197908042006041004	Penanggung Jawab
2	M. Ridwan, SH	199401052020121010	Ketua Tim
3	Rani Marlina, SE.,M.Si	197603162007012005	Anggota
4	Edwin Yulian Z.,A.Md	197207092009011007	Anggota

Untuk Melakukan Proobity Audit Intern Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu LKJIP Tahun 2025) Yang akan dilaksanakan :

Tanggal : 4 Februari 2026
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Brida Provinsi Sumatera Selatan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada Tanggal : 03-02-2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Tabel2.3Tujuan,Sasaran,StrategidanKebijakan Balitbangda ProvinsiSumselTahun2025-2029

VISI:SumselMajuTerus UntukSemua			
MISI VI:Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatkan Indeks Inovasi MeningkatkanEkosistemInovasi 2. Meningkatkan Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatkan Kebijakan Berbasis Bukti MeningkatkanFungsiKonservasi Kebun Raya Sriwijaya 4. Meningkatkan Kebijakan Berbasis Bukti (tlg dokoreksi ini)	Peningkatan Invensi dan Inovasi Pelayanan Publik dalam pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Ekosistem Inovasi/Indek Inovasi Daerah 2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti